



RENCANA KERJA TAHUN 2024

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116

Email : dinsos@bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 09 Agustus 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan	
Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi	
Perangkat Daerah	24
2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
 Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan	42
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V PENUTUP	57

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, Serta

- kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/ Kota
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - o. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D);
- v. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.
- w. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 / E);
- x. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 / E);
- y. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2024 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2024 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta evaluasi kinerja di tahun 2023 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2024 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023 semester 1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)*100
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 dokume n	3 doku men	3 doku men	3 doku men	100,00		6 doku men	67
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 doku men	3 doku men	
1.06.01.2. 01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun	6 dokume n	2 doku men	2 doku men	2 doku men	100,00		4 doku men	67

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2 dokumen	2 dokumen	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00		4 dokumen	67
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2 dokumen	2 dokumen	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00		2 dokumen	67
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Laporan	1 Laporan	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	24 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100,00		16 Laporan	67
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8 Laporan	8 Laporan	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	49 org/bln	42 org/bln	42 org/bln	100,00		91 org/bln	186
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						45 orang	45 orang	

1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	2 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00		1 Laporan	50
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD yang tersusun	2 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00		1 Laporan	50
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00		2 Laporan	67
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	1 Laporan	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	198 laporan	66 laporan	66 laporan	66 laporan	100,00		132 laporan	67
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						18 Laporan	18 Laporan	

1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	3 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	#DIV/0!		0 laporan	0
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1 dokumen	1 dokumen	
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100,00		28 Laporan	67
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						14 Laporan	14 Laporan	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0!		0 unit	0
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						1 unit	1 unit	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	270 buah	90 buah	90 buah	90 unit	100,00		180 buah	67
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						paket	0 paket	
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang tersusun	14 laporan	0 laporan	7 laporan	7 laporan	100,00		7 laporan	50

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						1 Dokumen	1 Dokumen	
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang tersusun	24 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00		12 Laporan	50
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						12 Dokumen	12 Dokumen	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	93,77 %	93,77	100 %	97,923 %	98
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132 unit	41 unit	72 unit	41 unit	56,94		82 unit	62
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						12 paket	12 paket	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57 unit	0 unit	967 unit	919 unit	95,04		919 unit	1.612
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12 paket	12 paket	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	495 unit	155 unit	170 unit	158 unit	92,94		313 unit	63
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						12 paket	12 paket	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00		8 jenis	67

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 paket	12 paket	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00		4 jenis	67
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						2 paket	2 paket	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00		3 jenis	50
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						24 Dokumen	24 Dokumen	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	50 kali	0 kali	25 kali	25 kali	100,00		25 kali	50
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						70 Laporan	70 Laporan	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 kali	1 kali	218 kali	218 kali	100,00		219 kali	66
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50 Laporan	50 Laporan	
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersusun	1 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00		1 laporan	100
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	

1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	95,45 %	95,45	100 %	98,483 %	98
1.06.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	39 unit	26 unit	66 unit	63 unit	95,45		89 unit	228
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						22 unit	22 unit	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	0 jenis	0 jenis	#DIV/0!		2 jenis	100
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 jenis	4 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00		7 jenis	78
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	2 jenis	0 jenis	0 jenis	#DIV/0!		2 jenis	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2 Laporan	2 Laporan	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 jenis	4 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00		7 jenis	78
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	

1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	66 %	66,00	100 %	88,6 67 %	89
1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100,00		3 unit	25
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						15 unit	15 unit	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	76 unit	17 unit	19 unit	19 unit	100,00		36 unit	47
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						5 unit	5 unit	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	0 unit	4 unit	2 unit	50,00		2 unit	13
		Jumlah Mebel yang dipelihara						16 unit	16 unit	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100,00		1 unit	25
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi						1 unit	1 unit	

1.06.01.2. 09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	197 unit	10 unit	63 unit	26 unit	41,27		36 unit	18
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						63 unit	63 unit	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	29 %	7,6 9 %	19 %	11, 46 %	60,32	24 %	43,1 5 %	149
1.06.02.2. 03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	29 %	7,6 9 %	19 %	11, 46 %	60,32	24 %	43,1 5 %	149
1.06.02.2. 03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah (Pekerja Sosial Masyarakat) PSM yang telah dibina	100 orang	0 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!		0 orang	0
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						70 orang	70 orang	
1.06.02.2. 03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS yang terbina	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	100,00		36 orang	200

		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						18 orang	18 orang	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00		2 laporan	40
		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						7000 Keluarga	7000 Keluarga	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang dibina	100 orang	0 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	#DIV/0!		0 lembaga	0
		Jumlah LKS yang dibantu	0 lembaga	6 lembaga	11 lembaga	11 lembaga	100,00		17 lembaga	#DIV/0!
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						14 lembaga	14 lembaga	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	0,16 %	100 %	90,33 %	90,33	100 %	63,49 %	63

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	200 orang	104 orang	746 orang	684 orang	91,69	175 orang	963 orang	482
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga anak terlantar, lanjut usia yang di bimbing	130 orang	64 orang	246 orang	211 orang	85,77		275 orang	212
		Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang di bimbing	70 orang	40 orang	500 orang	473 orang	94,60		513 orang	733
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						800 orang	800 orang	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dokumen masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00		2	67
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota						2000 orang	2000 orang	

1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	140 orang	40 orang	40 orang	26 orang	65,00	40 orang	106 orang	76
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah gelandangan pengemis dan masyarakat yang di bimbing	140 orang	27 orang	40 orang	26 orang	65,00		53 orang	38
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota						40 orang	40 orang	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	91,37 %	100 %	99,97 %	99,97	100 %	97,13 %	97
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	100 %	91,37 %	100 %	99,97 %	99,97	1 %	64,13 %	64
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	5.940 orang	7.521 orang	3.296 orang	3.296 orang	100,00		10817 orang	182
		Data Kemiskinan		1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0,00		1 dokumen	#DIV/0!

		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata						400.000 orang	400000 orang	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Dokumen data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) - Laporan hasil monitoring dan evaluasi PKH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00		2 dokumen	40
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						2750 Keluarga	2750 Keluarga	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0 keluarga	20 keluarga	19 keluarga	95,00		19 Keluarga	#DIV/0!
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						12 Keluarga	12 Keluarga	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %	85,04 %	85,04	100 %	95,013 %	95
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %	85,04 %	85,04	100 %	95,013 %	95
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00		200	200

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota						425 orang	425 orang	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	80	80,00	100 %	93,33 %	93
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	85 orang	25 orang	30 orang	24 orang	80,00		49 orang	58
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						24 orang	24 orang	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang di pelihara	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00		2	200
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota						50 Makam	50 Makam	

1.06.07.2. 01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00		4 kegiatan	200
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						2 Laporan	2 Laporan	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Evaluasi Perangkat Daerah

N o.	Indikator	SPM / Stan dar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	7	8			9	10	11	12	13
	Persentase (%)penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	V	V									
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	V	V									
	Indikator Tujuan											
1	Jumlah PMKS			567.205	567.111	566.999	566.869	501.674	638.972	567.111	566.999	
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial			0	100%	100%	100%	0	75,34	100%	100%	
	Indikator Sasaran											
1	Persentase PMKS yang dibina dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya			7,81	8,93	10,04	11,16	7	7,9	10,04	11,16	

2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			0	14%	19%	24%	0	7,69	19%	24%	
---	--	--	--	---	-----	-----	-----	---	------	-----	-----	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Keterbatasan sumberdana pembiayaan dalam penanganan kesejahteraan sosial
4. Keterbatasan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kompleksitas permasalahan PPKS yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)

2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD

Reviu terhadap rancangan RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan RKPD tahun 2024
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

N o.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutu han Dana (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Indeks	5.697.62 3.826	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Indeks	5.745.87 9.549	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100	%	12.500.0 00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100	%	12.500.0 00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokum en	4.500.00 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokum en	4.500.00 0	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	Dokum en	1.500.00 0	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	Dokum en	1.500.00 0	

	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.500.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	2.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	%	4.057.004.846	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	%	4.112.520.569	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	orang/bulan	4.047.004.846	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	orang/bulan	4.102.520.569	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	2.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	2.500.000	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	18	Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	18	Laporan	2.500.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	5.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	Dokumen	2.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	Dokumen	2.500.000	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	14	Laporan	2.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	14	Laporan	2.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	5.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	196.020.000	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	188.760.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	3.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	41.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	41.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	Paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket	32.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket	24.740.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Paket	12.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	15.520.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	15.520.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	40	Laporan	6.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	40	Laporan	6.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	41	Laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	41	Laporan	50.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.230.524.380	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.230.524.380	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	97.714.380	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	97.714.380	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Laporan	170.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Laporan	170.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	962.810.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	962.810.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	191.574.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	191.574.600	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	170.574.600	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	170.574.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	Unit	9.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	Unit	9.000.000	
	Pemeliharaan mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	0	Unit	0	Pemeliharaan mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	0	Unit	0	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	Unit	0	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23	Unit	12.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23	Unit	12.000.000	
	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	%	1.200.000.000	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	%	1.145.160.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	550	Orang	350.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	550	Orang	295.160.000	

	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	0	orang	0	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	0	orang	0	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	550	orang	350.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	550	orang	295.160.000	
	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	0	orang	0	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	0	orang	0	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	30	orang	850.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	30	orang	850.000.000	

	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	orang	730.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	orang	730.000.000	
	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	0	orang	0	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	0	orang	0	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza		Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	30	orang	120.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza		Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	30	orang	120.000.000	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	%	722.814.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	%	722.814.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	100	%	722.814.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	100	%	722.814.000	

	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	50.000	orang	300.000.000	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	50.000	orang	300.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1850	Keluarga	400.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1850	Keluarga	400.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Keluarga	22.814.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Keluarga	22.814.000	
	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	%	550.000.000	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	%	550.000.000	
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100	%	500.000.000	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100	%	500.000.000	

	Penyediaan makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	orang	500.000.000	Penyediaan makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	orang	500.000.000	
	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	orang	0	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	orang	0	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100	%	50.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100	%	50.000.000	
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24	orang	50.000.000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24	orang	50.000.000	

	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13	%	375.000.000	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13	%	375.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	29	PSKS	375.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	29	PSKS	375.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnyakewenangan Kabupaten/Kota	18	orang	150.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnyakewenangan Kabupaten/Kota	18	orang	150.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	1000	Keluarga	100.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	1000	Keluarga	100.000.000	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	125.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	11	Lembaga	125.000.000	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100	%	128.000.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100	%	128.000.000	

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1	Unit	128.000. 000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1	Unit	128.000. 000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	Maka m	38.000.0 00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	Maka m	38.000.0 00	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	Lapora n	90.000.0 00	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	Lapora n	90.000.0 00	
						8.673.43 7.826						8.666.85 3.549	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur, dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 didasarkan pada program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program yang mendukung prioritas pembangunan nasional dalam rangka *memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan* dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Pemberdayaan Sosial** telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian kecepatan penurunan kemiskinan mengalami perlambatan.

Dalam rangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu (1) penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif; dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan dilindungi pemenuhan kebutuhan dasarnya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial.

Dalam rangka *membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim* didukung oleh **Program Penanganan Bencana**. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial terdiri dari :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti;

- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota

Sejalan dengan prioritas pembangunan propinsi untuk meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sedangkan untuk Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup didukung oleh Program Penanganan Bencana.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tujuan Renja Dinas Sosial

1. Meningkatkan PPKS yang tertangani

Sasaran Renja Dinas Sosial

1. Meningkatnya capaian SPM Urusan Sosial
2. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	TUJUAN				SASARAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	TARGET		
			2024	2025			2024	2025	
1	Meningkatkan PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	6,22 %	7,69 %	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	100 %	100 %	
2					Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13%	14%	
3					Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78,5	
						Nilai SAKIP	61	61,5	

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.2
Strategi dan Kebijakan Program/Kegiatan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1. Meningkatkan PPKS yang tertangani	1.1 Meningkatnya Capaian SPM urusan sosial	1.1.1 Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1.1.a Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
			1.1.1.b Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bagi PPKS	
			1.1.1.c Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS di luar panti	

		1.1.2 Pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran kepada PPKS melalui peningkatan kualitas layanan data terpadu kesejahteraan sosial	1.1.2.a Pemutakhiran berkala DTKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			1.1.2.b Optimalisasi DTKS sebagai basis data pemberian layanan kesejahteraan sosial	
			1.1.2.c Penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan	
			1.1.2.d Penggunaan aplikasi berbasis teknologi dalam sistem layanan kesejahteraan	
		1.1.3 Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial	1.1.3.a Peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya yang responsif dan adaptif terhadap bencana	Program Penanganan Bencana
			1.1.3.b Kolaborasi dan sinkronisasi pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial dengan pihak terkait	
	1.2 Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1.2.1 Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	1.2.1.a Meningkatkan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelaksanaan pembinaan, penilaian, bimbingan dan pemberian dana stimulasi	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	1.3 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	1.3.1 Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien dan profesional	1.3.1.a Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1.3.1.b Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan	

		1.3.2 Pemenuhan kebutuhan layanan penunjang kantor	1.3.2.a Melaksanakan sinergisitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan	
--	--	--	--	--

Dalam rangka upaya menjawab dan mengatasi isu-isu strategis tersebut di atas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai OPD, Dinas Sosial telah merencanakan program, kegiatan dan pendanaan yang disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas anggaran belanja daerah dan sumber lain yang sah.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 terdapat 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif Rp. 8.666.853.549.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

4.1. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2024 :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinsos	100	Indeks	5.745.879.549	DAUM		100	Indeks	5.789.099.346
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Dinsos	100	%	12.500.000	DAUM		100	%	12.500.000
1.06.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	2	Dokumen	4.500.000	DAUM		2	Dokumen	4.500.000
1.06.01.2.01 .02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	2	Dokumen	1.500.000	DAUM		2	Dokumen	1.500.000

1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	2	Dokumen	1.500.000	DAUM		2	Dokumen	1.500.000
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	1	Laporan	2.500.000	DAUM		1	Laporan	2.500.000
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	4	Laporan	2.500.000	DAUM		4	Laporan	2.500.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Dinsos	100	%	4.112.520.569	DAUM		100	%	4.148.004.846
1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinsos	43	orang/bulan	4.102.520.569	DAUM		43	orang/bulan	4.138.004.846
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	1	Dokumen	2.500.000	DAUM		1	Dokumen	2.500.000
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinsos	1	Dokumen	2.500.000	DAUM		1	Dokumen	2.500.000

1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	1	Laporan	2.500.000	DAUM		1	Laporan	2.500.000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dinsos	18	Laporan	2.500.000	DAUM		18	Laporan	2.500.000
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinsos	100	%	5.000.000	DAUM		100	%	5.000.000
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dinsos	1	Dokumen	2.500.000	DAUM		1	Dokumen	2.500.000
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dinsos	14	Laporan	2.500.000	DAUM		14	Laporan	2.500.000
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinsos	100	%	5.000.000	DAUM		100	%	5.000.000

1.06.01.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos	12	Dokumen	5.000.000	DAUM		12	Dokumen	5.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	100	%	188.760.000	DAUM		100	%	196.020.000
1.06.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	3.500.000	DAUM		12	Paket	3.500.000
1.06.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	41.500.000	DAUM		12	Paket	41.500.000
1.06.01.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinsos	12	Paket	5.000.000	DAUM		12	Paket	5.000.000
1.06.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	24.740.000	DAUM		12	Paket	32.000.000
1.06.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Dinsos	12	Paket	12.000.000	DAUM		12	Paket	12.000.000
1.06.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinsos	12	Dokumen	15.520.000	DAUM		12	Dokumen	15.520.000
1.06.01.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinsos	40	Laporan	6.500.000	DAUM		40	Laporan	6.500.000

1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Daerah	41	Laporan	50.000.000	DAUM		41	Laporan	50.000.000
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinsos	1	Dokumen	30.000.000	DAUM		1	Dokumen	30.000.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	100	%	1.230.524.380	DAUM		100	%	1.230.524.380
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	97.714.380	DAUM		12	Laporan	97.714.380
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinsos	2	Laporan	170.000.000	DAUM		2	Laporan	170.000.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	962.810.000	DAUM		12	Laporan	962.810.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	100	%	191.574.600	DAUM		100	%	192.050.120

1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinsos	14	Unit	170.574.600	DAUM		14	Unit	171.050.120
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinsos	10	Unit	9.000.000	DAUM		10	Unit	9.000.000
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	23	Unit	12.000.000	DAUM		23	Unit	12.000.000
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Kab. Bangkalan	100	%	1.145.160.000			100	%	1.250.000.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Bangkalan	550	Orang	295.160.000	DAUM		550	Orang	400.000.000

1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Kab. Bangkalan	550	orang	295.160.000	DAUM		550	orang	400.000.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Bangkalan	30	orang	850.000.000	DAUM		30	orang	850.000.000
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	orang	730.000.000	DAUM		1000	orang	730.000.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	30	orang	120.000.000	DAUM		30	orang	120.000.000
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Kab. Bangkalan	100	%	722.814.000	DAUM		100	%	822.814.000

1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	Kab. Bangkalan	100	%	722.814.000	DAUM		100	%	822.814.000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Kab. Bangkalan	50.000	orang	300.000.000	DAUM		50.000	orang	300.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1850	Keluarga	400.000.000	DAUM		1850	Keluarga	500.000.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	20	Keluarga	22.814.000	DBHC HT		20	Keluarga	22.814.000
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kab. Bangkalan	100	%	550.000.000	DAUM		100	%	550.000.000
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Kab. Bangkalan	100	%	500.000.000	DAUM		100	%	500.000.000

1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	orang	500.000.000	DAUM		1000	orang	500.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	Kab. Bangkalan	100	%	50.000.000	DAUM		100	%	50.000.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	24	orang	50.000.000	DAUM		24	orang	50.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kab. Bangkalan	13	%	375.000.000	DAUM		14	%	375.000.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	Kab. Bangkalan	29	PSKS	375.000.000	DAUM		29	PSKS	375.000.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnyakewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	18	orang	150.000.000	DAUM		18	orang	150.000.000

1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	Keluarga	100.000.000	DAUM		1000	Keluarga	100.000.000
1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	11	Lembaga	125.000.000	DAUM		11	Lembaga	125.000.000
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	TMP Bangkalan	100	%	128.000.000	DAUM		100	%	128.000.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	TMP Bangkalan	1	Unit	128.000.000	DAUM		1	Unit	128.000.000
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Bangkalan	50	Makam	38.000.000	DAUM		50	Makam	38.000.000
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP Bangkalan	2	Laporan	90.000.000	DAUM		2	Laporan	90.000.000
						8.666.853.549					8.914.913.346

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2024 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2024 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2024, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PPKS sesungguhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi pelayanan publik dasar. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk pelayanan sosial untuk PPKS menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Program-program penanganan PPKS pada hakekatnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam dan bencana sosial perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan dini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pelopor Perdamaian serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasana yang memadai.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2024.

Bangkalan, 09 Agustus 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001